

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dapat disimpulkan mengenai Proses penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembukuan

Kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai belum berjalan baik dan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Permasalahan ini terkait beberapa temuan BPK terhadap proses pencatatan yang tidak sesuai dengan amanat regulasi yang berlaku.

b. Kegiatan Inventarisasi

Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan inventarisasi disebabkan oleh Kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan pembukuan. Selain itu, permasalahan juga terkait keterangan dalam kartu inventaris gabungan mengenai keadaan barang yang tidak mengungkapkan keadaan fisik barang.

c. Kegiatan Pelaporan

Dinas Pendidikan tidak bermasalah dalam kaitan dengan waktu atau keterlambatan pelaporan. Akan tetapi, kesalahan dalam kegiatan pembukuan dan kegiatan inventarisasi membawa pengaruh terhadap

informasi yang tidak objektif dalam tahap pelaporan. Sedangkan permasalahan dalam inventarisasi yang telah diuraikan berpengaruh pada kesalahan dalam informasi mengenai mutasi barang dan daftar mutasi barang yang tidak akurat.

Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan aset tetap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, antara lain: ketersediaan Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman tentang regulasi terkait penatausahaan aset tetap serta kelalaian pihak-pihak yang terkait terhadap proses penatausahaan aset tetap yang baik. Selain faktor Sumber Daya Manusia, ketiadaan dokumen pendukung dan ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan aset khususnya penatausahaan aset tetap Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai terkait permasalahan penatausahaan aset tetap adalah dengan mengeluarkan SK pembentukan tim inventarisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai mengenai Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. Selanjutnya tim melakukan inventarisasi ke setiap Unit Pengelola Barang sesuai dengan amanat yang termuat dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan setiap pihak pada Dinas Pendidikan melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran kepada para pihak di Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai perlu menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam memahami tata cara pengelolaan aset yang baik sebagaimana termuat dalam regulasi yang berlaku. Untuk mencapai maksud tersebut, maka para pihak yang terkait dengan penatausahaan aset tetap baik pihak yang berada di Unit Pengguna Barang maupun pihak-pihak yang berada di Dinas Pendidikan perlu diberikan pelatihan tentang tata cara penatausahaan aset tetap sesuai dengan amanat regulasi yang ada.
- b. Para pihak di setiap Unit Pengguna Barang dan pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan aset tetap perlu memberikan laporan kepada bendahara barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai setiap kali terjadi transaksi pengadaan barang. Selain itu, para pihak juga perlu menertibkan dokumen pendukung sebagai bukti yang menyatakan kepemilikan sah terhadap aset daerah yang dimiliki. Disamping itu, bendahara barang di Dinas Pendidikan perlu melakukan pencatatan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- c. Dinas Pendidikan perlu menggunakan jasa auditor independen untuk melakukan pengecekan terhadap keadaan fisik barang sekaligus memberikan penilaian mengenai keberadaan aset tersebut apakah masih layak dipakai atau seharusnya dihapus. Untuk tujuan penilaian, Dinas

Pendidikan harus mengadakan jadwal rapat untuk penghapusan aset yang tidak layak untuk dipakai.

- d. Setiap pihak di Dinas Pendidikan harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, setiap pihak perlu mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya penatausahaan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2011. *“Sistem Akuntansi Sektor Publik”*. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017. *“Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT Tahun Anggaran 2017”*
- Halim, Abdul. 2012. *“Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah”*. Jakarta: Salemba Empat
- Hidayat. 2016. *“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap”*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas
- Hoesada, Jan. 2016. *“Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan”*. Jakarta: Salemba Empat
- Jedo, Dewi. 2017. *“Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016”*
- Juwita, Rukmi. 2013. *“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”* Jurnal Trikonomika Vol. 12 No.2 Politeknik Pos Indonesia
- Katadata.co.id/berita/2018/05/31/bpktemukan18permasalahandalamlaporankeuanganpemerintah
- Mahmudi. 2010. *“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Masipuang, Ilat dan Pinatik. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2018 tentang *Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *“Standar Akuntansi Pemerintahan”*. Bandung: Fokusmedia
- Ratnamo Dwi dan Sholihin. 2015. *“Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrual”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Regel, Manossoh dan Warongan. 2018. *“Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara”*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern

Saraswati, Budiwibowo dan Sulistyowati. 2017. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Madiun”*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 2

Tipan, Saeran dan Lambey. *“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara”*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sam Ratulangi Manado

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 *“Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *“Keuangan Negara”*

Wati, Fitriana. 2011. *“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur”*. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

[www.cnnindonesia.com/nasional/20150605175125-20-58005/bpktemukanempat
masalahdilaporankeuanganpemerintah2015](http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150605175125-20-58005/bpktemukanempatmasalahdilaporankeuanganpemerintah2015)

www.hukumonline.com/berita

www.linguistikid.com